

Laporan Akhir

Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk  
Daerah Istimewa Yogyakarta



# Penyusunan Kajian/Master Plan **DESA MANDIRI BUDAYA** Desa Margodadi Seyegan Sleman



**Penyusunan Kajian**  
**Masterplan Desa Mandiri Budaya**  
**Desa Margodadi, Sayegan Sleman, Di. Yogyakarta**

**Tim Penyusun:**

1. Dr. Suparmono, M.Si
2. Dr. Nining Yuniati, M.Par
3. Yunastiawan Eka Pramana, ST, M.Sc
4. Edi Suandana, M.Dev



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I-1
1.3. Wilayah Perencanaan.....	I-2
1.4. Lingkup Kegiatan .....	I-2
1.5. Metode Penelitian.....	I-3
1.6. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	I-10

### BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL DESA MANDIRI BUDAYA

2.1. Pendekatan Perencanaan.....	II-1
2.2. Desa Budaya .....	II-4
2.3. Desa Wisata .....	II-6
2.4. Desa Prima.....	II-8
2.5. Desa Preneur .....	II-10
2.6. Desa Mandiri Pangan .....	II-11
2.7. Desa Mandiri Budaya .....	II-13
2.8. Regulasi .....	II-14

### BAB III PROFIL KALURAHAN MARGODADI

3.1. Profil Umum .....	III-1
3.2. Profil Khusus.....	III-15

### BAB IV PENETAPAN VISI DAN TARGET

4.1. Integrasi Antar-Sektor dan <i>Trigger</i> Pembangunan Kalurahan Margodadi.....	IV-1
4.2. Tema Pengembangan Kawasan Tahun 2022-2027 .....	IV-2
4.3. Telaah RPJMDKal Margodadi Tahun 2016-2021.....	IV-4
4.4. Visi dan Misi Desa Mandiri Budaya Kalurahan Margodadi .....	IV-5

### BAB V PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN

### BAB VI STRATEGI DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BUDAYA KALURAHAN MARGODADI

6.1. Strategi Pengembangan Desa Mandiri Budaya Margodadi .....	VI-1
6.2. Kegiatan.....	VI-2

### BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan .....	VII-1
7.2. Rekomendasi .....	VII-2

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

1.1. Kebutuhan dan Sumber Data .....	I-4
1.2. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan .....	I-10
3.1. Luas Penggunaan Lahan Kalurahan Margodadi.....	III-8
3.2. Fasilitas Pendidikan di Kalurahan Margodadi Tahun 2021.....	III-13
3.3. Potensi dan Permasalahan Sektor Kebudayaan .....	III-17
3.4. Jenis Kesenian dan Lokasinya di Kalurahan Margodadi.....	III-19
3.5. Kunjungan Wisatawan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2019-2020	III-19
3.6. Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW Kab Sleman Tahun 2016-2020.....	III-20
3.7. PAD Sektor Pariwisata Se-DIY Tahun 2018 - 2019 .....	III-20
3.8. Potensi dan Permasalahan Sektor Pariwisata.....	III-23
3.9. Potensi dan Permasalahan Sektor UMKM dan Koperasi.....	III-25
3.10. Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB di Kapanewon Seyegan .....	III-28
3.11. Potensi dan Permasalahan Sektor Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk .....	III-29
3.12. Jenis Komoditas Tanaman Pangan di Kalurahan Margodadi Tahun 2019...	III-30
3.13. Potensi dan Permasalahan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan .....	III-34
3.14. Potensi dan Permasalahan Kebencanaan .....	III-38



## DAFTAR GAMBAR

1.1. Kerangka Pikir.....	I-4
3.1. Peta Administrasi Kalurahan Margodadi .....	III-1
3.2. Peta Topografi Kalurahan Margodadi .....	III-2
3.3. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sleman.....	III-3
3.4. Peta Hidrologi Kalurahan Margodadi.....	III-4
3.5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Sleman .....	III-4
3.6. Peta Geologi Kabupaten Sleman.....	III-5
3.7. Peta Bencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Sleman.....	III-7
3.8. Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Margodadi.....	III-8
3.9. Jumlah Penduduk Kalurahan Margodadi Tahun 2016 – 2020.....	III-9
3.10. Jumlah Penduduk Kalurahan Margodadi Tahun 2016 – 2020.....	III-10
3.11. Peta Kelas Kepadatan Penduduk Kapanewon Seyegan .....	III-10
3.12. Jumlah Penduduk Kalurahan Margodadi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	III-11
3.13. Jumlah Penduduk Kalurahan Margodadi Berdasarkan Mata Pencaharian.....	III-11
3.14. Peta Aksesibilitas Menuju Pusat Daerah .....	III-12
3.15. Wisata Edukasi Budaya di Desa Wisata Grogol .....	III-21
3.16. Peta Sebaran Objek/DTW Kalurahan Margodadi .....	III-22
3.17. Kelahiran, Kematian, Penduduk Datang dan Penduduk Pergi di Kalurahan Margodadi Tahun 2017–2020 .....	III-27
3.18. Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi Berdasarkan Metode Tahun 2017-2020 .....	III-28
3.19. Tren Target Peserta KB di Kalurahan Margodadi Tahun 2017 - 2020 .....	III-29
3.20. Produksi Padi dan Cabai di Kapanewon Seyegan .....	III-30
3.21. Produksi Padi Sawah per Desa di Kapanewon Seyegan .....	III-31
3.22. Produksi Cabai Merah per Desa di Kapanewon Seyegan .....	III-31
3.23. Peta Kerawanan Bencana Kabupaten Sleman .....	III-36
5.1. <i>Site Plan Showroom</i> UMKM Center .....	V-5
5.2. Peta Prioritas Pengembangan Kalurahan Margodadi.....	V-8



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keistimewaan DIY terbentuk salah satunya dari kekhasan tata pemerintahannya. Tata pemerintahan di DIY sudah berlangsung dengan baik sejak jaman sebelum kemerdekaan. Tata Pemerintahan DIY di susun dari kapanewonan yang mengkoordinir beberapa kalurahan. Kalurahan-kalurahan ini dapat hidup dan menyelenggarakan pemerintahan dengan baik secara mandiri. Hal ini di dukung oleh segenap potensi yang ada di wilayahnya. Potensi yang dimiliki oleh kalurahan sangatlah beragam dan banyak. Hal ini haruslah mampu dikelola dengan baik dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga pada akhirnya akan memberi andil bagi kemajuan DIY. Selaras dengan hal tersebut pada acara “*Sopo Aruh, Refleksi Sewindu Pelaksanaan Keistimewaan DIY*”, Sri Sultan Hamengku Buwono X meyakini bahwa jika segala potensi “kebaikan” itu dilancarkan dari desa dengan strategi: “Desa Mengepung Kota”, niscaya desa akan menjadi sentra pertumbuhan. Salah satu konsep yang diusung adalah mengoptimalkan Desa Mandiri Budaya.

Desa Mandiri Budaya sebagai desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan. Hal ini dilakukan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumberdaya dan kebudayaan yang dimilikinya. Sekaligus dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an.

Salah satu Desa Mandiri Budaya adalah Kalurahan Margodadi yang berada di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Desa Margodadi merupakan Desa Mandiri Budaya yang mempunyai beragam potensi, mulai dari peninggalan cagar budaya Selokan Mataram yang menyimpan nilai sejarah, rumah tradisional, hingga situs Tuk Si Bedug dengan upacara adatnya yaitu Upacara Adat Pamidhangan, Nyadran, Wiwitan, dan Merti Dusun. Tak hanya itu, aktivitas kesenian berupa Ketoprak, Campursari, Karawitan, Wayang Kulit, Wayang Wong, Tari, Organ, Hadroh, Qosidhah, Jathilan, dan Macapat juga turut menyemarakkan Desa Mandiri Budaya tersebut. Mata pencaharian penduduk di Desa Margodadi selain pertanian juga berkembang dalam menghasilkan kerajinan. Kerajinan yang dikembangkan masyarakat antara lain: Pembuatan Wayang Kulit, Gamelan, Gerabah, Gedheg, Bambu, Aksesoris dan Batik. Terdapat pula berbagai macam kuliner antara lain: Bebek Bacem, Kecap, dan Kopi. Modal sosial yang berupa tata nilai Yogyakarta juga terselenggara dengan baik. Segenap potensi ini tentunya perlu dikembangkan lebih lanjut dalam jangka pendek dan jangka panjang.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun kajian atau *masterplan* Pembangunan Desa Mandiri Budaya Margodadi Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Menyusun profil Desa Mandiri Budaya Margodadi;
2. Menyusun arahan pembangunan Desa Margodadi; dan



3. Menyusun tahapan, anggaran, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan Desa Margodadi.

### **1.3. Wilayah Perencanaan**

Kajian ini dilakukan di Desa Margodadi Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman yang meliputi 16 dusun, yaitu:

1. Beran
2. Druju
3. Grogol
4. Jagalan
5. Japanan
6. Jlegongan
7. Kadipiro
8. Kandangan
9. Kasuran
10. Kurahan III
11. Kurahan IV
12. Mranggen
13. Pendekan
14. Pete
15. Tegalweru
16. Terwilen

### **1.4. Lingkup Kegiatan**

#### **1.4.1. Materi Kajian**

Kajian yang dilakukan meliputi multi sektor pembangunan yaitu:

1. Kebudayaan;
2. Kepariwisataaan;
3. Koperasi & UMKM;
4. Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
5. Pertanian & Ketahanan Pangan; dan
6. Kebencanaan & Iklim.

#### **1.4.2. Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap KAK, menyusun tenaga ahli, penjadwalan, dan metodologi, menyusun instrumen pendataan;
2. Melaksanakan paparan pendahuluan;
3. Melaksanakan survei lapangan dan kajian pustaka;
4. Menyajikan data potensi dan permasalahan dalam bentuk tabel dan peta, serta analisa deskriptif menjadi profil kalurahan;
5. Melaksanakan paparan antara;
6. Melakukan analisa potensi dan permasalahan guna pengembangan kalurahan;
7. Menyusun visi dan target dalam pengembangan potensi kalurahan;



8. Menyusun rencana aktivitas pengembangan yang meliputi antara lain arahan pembangunan, tahapan pelaksanaan, estimasi anggaran, dan pelibatan pemangku kepentingan;
9. Melaksanakan paparan akhir; dan
10. Melaksanakan rapat konsultasi dengan pengguna anggaran sesuai kebutuhan.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

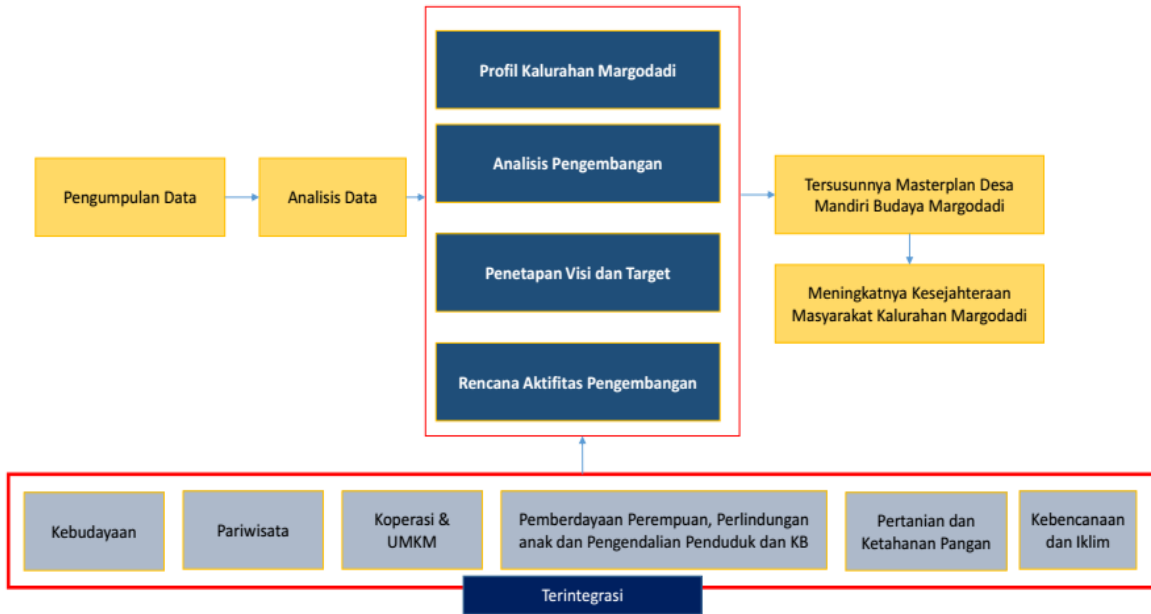
Jenis penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini yakni berupa penelitian deskriptif kualitatif. Menurut pernyataan Nana Sudjana dan Ibrahim (2001:64), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan). Kemudian metode penelitian kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002), menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivism* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

### **1.5.2. Kerangka Pikir**

Penyusunan *Masterplan* Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Margodadi diawali dengan kegiatan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang mencakup kondisi umum dan kondisi khusus Kalurahan Margodadi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu: wawancara, kuesioner, FGD, observasi, dan *desk study*. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan berbagai teknik analisis yaitu: *content analysis*, RCA, N-vivo, dan spasial. Setelah dilakukan analisis, maka akan diperoleh gambaran umum terkait profil kelurahan, rencana analisis pengembangan, penetapan visi dan target, serta rencana aktifitas pengembangan. Analisis yang dilakukan meliputi beberapa sektor yaitu: Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi dan UMKM, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB, Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Kebencanaan dan Iklim. Dalam pengembangannya, masing-masing sektor tersebut dilakukan secara terintegrasi sehingga ada keterkaitan antar-sektor dalam pengembangan Kalurahan Margodadi kedepan. Tersusunnya masterplan Mandiri Budaya Margodadi diharapkan dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Margodadi.





**Gambar 1.1.**  
**Kerangka Pikir**

### 1.5.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penyusunan *Masterplan* Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kebutuhan data dalam penyusunan *masterplan* ini disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.1.**  
**Kebutuhan dan Sumber Data**

No	Aspek Analisis	Kebutuhan Data	Sumber Data
1	Kebijakan Pembangunan Skala Makro di Kabupaten Sleman	Penyusunan <i>Review Grand Design</i> Desa Mandiri Budaya tahun 2021	Paniradya Keistimewaan
		Profil Desa Budaya, 2019	Kundha Kabudayan
		Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman	Bappeda Sleman
		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman	Bappeda Sleman
		Rencana Induk Pariwisata Daerah Provinsi DIY	Dinas Pariwisata DIY
		Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Sleman	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman
2	Aspek Tata Ruang	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman
		Kajian Rencana Detail Tata Ruang Kapanewon Seyegan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman



No	Aspek Analisis	Kebutuhan Data	Sumber Data
3	Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, dan Kependudukan	Kapanewon Seyegan dalam Angka 2016-2021	BPS Kabupaten Sleman
		Monografi Kalurahan Margodadi 2016-2021	Kalurahan Margodadi
		Data Profil Desa Wisata Kalurahan Margodadi	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Pokdarwis
		Data <i>Event</i> Seni dan Kebudayaan Kalurahan Margodadi	Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Pokdarwis
		Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah	
4	Aspek Administratif dan Analisis Spasial	Peta Administratif Desa Margodadi (Batas Kalurahan dan Padukuhan)	Kalurahan Margodadi
		Peta Sebaran Kepemilikan Lahan Desa Margodadi	Kalurahan Margodadi
		Citra Satelit Kalurahan Margodadi	
5	Aspek Sarana dan Prasarana Wilayah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Kalurahan Margodadi	Kalurahan Margodadi
		Hasil Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2019-2021	Kalurahan Margodadi
		Peta Jaringan Jalan	Dinas PUPR Kabupaten Sleman
		Peta Rencana Pengembangan Jalan Tol	Dinas PUPR Kabupaten Sleman
		Peta Jaringan Listrik	Dinas PUPR Kabupaten Sleman
		Peta Jaringan Irigasi	Dinas PUPR Kabupaten Sleman
6	Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Mandiri Wisata Berbasis Budaya	Persepsi masyarakat terhadap rencana pengembangan dan rencana pembangunan desa	FGD
		Potensi dan permasalahan pengembangan pariwisata dan pembangunan desa	FGD/Observasi

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam rangka penyusunan *Masterplan* Desa Mandiri Budaya di Kalurahan Margodadi Kapanewon Seyegan ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data dalam kajian ini meliputi:

##### 1. Desk Study

*Desk study* dilakukan untuk mengkaji data-data sekunder yang diperlukan di dalam kegiatan ini. *Desk study* dilakukan melalui:

- Kajian literatur, dengan mengkaji sumber-sumber data sekunder berupa dokumen kebijakan terkait kebijakan pembangunan, tata ruang, serta pengembangannya.



Kajian literatur dilakukan untuk melihat arah kebijakan dalam pengembangan berbagai sektor khususnya di wilayah Kalurahan Margodadi.

- b. Pengolahan data kuantitatif untuk menghasilkan gambaran umum terkait wilayah perencanaan menggunakan pendekatan statistik deskriptif sebagai gambaran awal terhadap obyek perencanaan. Hasil dari pengolahan data secara kuantitatif ini perlu untuk diverifikasi dan diklarifikasi, baik melalui observasi lapangan, FGD, maupun wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan.
- c. Pengolahan data spasial. Data spasial menjadi elemen penting di dalam penyusunan *masterplan* pengembangan desa wisata mandiri berbasis budaya di Kalurahan Margodadi. Pengolahan data spasial dilakukan menggunakan piranti lunak pengolahan data spasial ArcGIS Pro. Melalui pengolahan data spasial ini dapat dilakukan *overlay*/tumpang susun terhadap berbagai informasi yang bersifat spasial, termasuk di dalamnya melakukan *overlay* terhadap berbagai kebijakan keruangan yang berlaku di wilayah perencanaan serta memetakan persebaran potensi dan permasalahan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di wilayah perencanaan.

## 2. Observasi

Observasi dalam kajian ini merupakan metode yang digunakan untuk menghimpun data primer di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh tim perencana. Observasi dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengamati kondisi aktual wilayah. Berbagai temuan di lapangan kemudian dilakukan pencatatan sebagai data dan bukti untuk melakukan analisis dalam kajian Desa Mandiri Budaya Margodadi. Untuk kelancaran kegiatan observasi, maka diperlukan pendampingan oleh pihak-pihak kelurahan maupun masyarakat lokal yang paham dengan kondisi wilayah Kalurahan Margodadi sehingga data yang dikumpulkan menjadi lebih konkrit dan periode observasi menjadi lebih efisien. Selain mengamati dan mencatat, tim perencana juga akan melakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi-lokasi objek strategis yang ada di Kalurahan Margodadi yang terdiri atas fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, persampahan, kantor pemerintahan dan sarana prasarana umum lainnya yang juga dilakukan pengamatan terhadap kondisi sarana dan prasarana eksisting. Selain itu, juga dilakukan pengambilan titik koordinat pada lokasi-lokasi pariwisata, baik pariwisata budaya maupun alam yang ada di Kalurahan Margodadi.

## 3. Wawancara mendalam/*in-depth interview*

Kegiatan wawancara dalam kajian ini dilakukan untuk memperoleh data maupun informasi dengan melakukan percakapan secara tatap muka antara surveyor dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara, namun tidak menutup kemungkinan untuk terus mengembangkan pertanyaan dalam wawancara dalam rangka menggali informasi lebih mendalam. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa perspektif informan dalam memandang dan menyikapi konsep Desa Mandiri Budaya Margodadi. Responden dalam kajian ini merupakan masyarakat lokal di Kalurahan Margodadi dengan kebebasan untuk memberikan respon terhadap konsep pengembangan wilayah tanpa tekanan dari pihak manapun rasa sungkan/malu dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh surveyor.



#### 4. Kuesioner

Pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan menyebarkan lembaran yang berisi daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mendukung proses analisis dalam kajian konsep Desa Mandiri Budaya Margodadi. Daftar pertanyaan disusun sedemikian rupa untuk mencapai maksud dan tujuan dari kajian ini. Lembar pertanyaan kuesioner disebarikan secara *offline* kepada masyarakat lokal di Kalurahan Margodadi pada saat melakukan kegiatan observasi lapangan.

#### 5. *Focus Group Discussion* dan *Participatory Mapping*

*Focus Group Discussion* (FGD) merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bantuan partisipasi dari informan sebagai narasumber. Informan yang ditunjuk sebagai narasumber dalam kajian Desa Mandiri Budaya Margodadi terdiri atas tokoh-tokoh penting yang dianggap memiliki wawasan terhadap wilayah Kalurahan Margodadi yang mampu mewakili pandangan penduduk Kalurahan Margodadi terhadap pengembangan konsep Desa Mandiri Budaya Margodadi. Kegiatan FGD dalam kajian ini bertujuan untuk (1) Menghimpun data dan informasi terkait kondisi aktual wilayah serta arah rencana pengembangan Kalurahan Margodadi, (2) menggali informasi terkait potensi dan permasalahan wilayah Kalurahan Margodadi, (3) melakukan verifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan pada kegiatan observasi dan *desk study*, (4) menjaring persepsi dan aspirasi masyarakat Kalurahan Margodadi mengenai arah, strategi, dan kebijakan pengembangan pariwisata berbasis budaya di Kalurahan Margodadi, (5) menjaring persepsi dan aspirasi masyarakat mengenai prioritas program pengembangan sekaligus rencana implementasinya di dalam mewujudkan desa wisata mandiri berbasis budaya.

Kegiatan FGD dalam kajian Desa Mandiri Budaya Margodadi terbagi atas 2 kegiatan, yakni diskusi secara lisan dan pemetaan partisipatif (*participatory mapping*) yang dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh kalurahan yang dinilai mampu memberikan gambaran wilayah sebagai informan. Selama kegiatan FGD, para informan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan wilayah yang berdekatan/berdampingan sehingga dapat bersama-sama menuangkan potensi dan permasalahan di wilayah. Pelaksanaan kegiatan FGD dengan diskusi dibantu dengan fasilitator bersama dengan moderator yang membantu pembahasan masalah yang diangkat dalam kajian ini sehingga data yang dikumpulkan dari peserta FGD dapat tepat sasaran sehingga mampu menunjang kegiatan analisis yang akan dilakukan selanjutnya.

Sementara itu, pemetaan partisipatif dilakukan untuk mengetahui berbagai potensi maupun permasalahan wilayah secara spasial dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Misalnya, mendapatkan informasi tentang lokasi dengan potensi wisata alam dan buatan, wilayah rawan bencana, wilayah rawan kejadian kriminal dan sebagainya. Hasil dari pemetaan partisipatif ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan berbasis wilayah atau *spatial based policy* untuk mensukseskan penerapan konsep Desa Mandiri Budaya Margodadi. Selain itu, juga dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap kegiatan observasi selama masa FGD sehingga informasi yang didapatkan dapat dikatakan sebagai informasi yang valid dan reliabel.



### 1.5.5. Teknik Analisis

#### 1. Konten Analisis

Fraenkel dan Wallen (2007:483) menyatakan konten analisis/analisis isi adalah teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti: buku teks, esay, koran, novel, artikel, majalah, lagu, gambar iklan, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.

Sementara, Weber (Satori dan Komariah, 2009:157) menyatakan bahwa analisis isi adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Lebih lanjut Holsti (Satori dan Komariah, 2009:157) menjelaskan bahwa analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Terdapat pula lima prinsip dasar dalam penggunaan teknik ini. Guba dan Lincoln (Satori dan Komariah, 2009:157) mengemukakan lima prinsip dasar analisis isi tersebut sebagai berikut.

- a) Proses mengikuti aturan. Setiap langkah dilakukan atas dasar aturan dan prosedur yang disusun secara eksplisit;
- b) Analisis isi adalah proses sistematis. Hal ini berarti dalam rangka pembentukan kategori sehingga memasukkan dan mengeluarkan kategori dilakukan atas dasar aturan yang taat asas;
- c) Analisis isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi;
- d) Analisis isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Jadi, jika peneliti akan menarik kesimpulan harus berdasarkan isi suatu dokumen yang termanifestasikan; dan
- e) Analisis ini dapat dianalisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan dengan analisis kualitatif.

#### 2. Analisis Spasial

Upaya untuk mendapatkan informasi terkait wilayah diperlukan analisis spasial yang merupakan metode analisis dalam rumpun ilmu geografi. Analisis spasial saat ini didukung dengan penggunaan penginderaan jauh bahan analisis dan sistem informasi geografis sebagai alat analisis. Karena analisis spasial merupakan analisis ruang, maka data lokasi dengan atributnya yang berisikan informasi pendukung data lokasi merupakan data utama dalam kegiatan analisis.

Selain itu, analisis spasial juga bisa didefinisikan sebagai teknik yang dapat digunakan untuk meneliti dan juga mengeksplorasi dari sudut pandang keruangan. Semua teknik ataupun pendekatan perhitungan secara matematis yang berhubungan dengan data keruangan atau spasial dilakukan dengan menggunakan fungsi analisis spasial. Sementara menurut Kemp (2008), analisis spasial merupakan penggunaan secara sistematis lokasi geografis dari obyek yang dikaji sebagai variabel penting dalam deskripsi, analisis, dan prediksi.

Selanjutnya mengenai fungsi dari analisis spasial, menurut Eddy Prahasta (2009), fungsi dari analisis spasial yaitu:

1. Pemrosesan citra digital (*digital image processing*) digunakan untuk akuisisi data spasial seperti sebaran lokasi, klasifikasi objek, tingkat kepadatan objek.



2. 3D Analysis, bertujuan untuk mendapatkan informasi spasial yang tidak hanya berbasis pada nilai x dan y namun juga nilai ketinggian (z) melalui presentasi data tiga dimensi.
3. *Overlay*, merupakan proses penggabungan 2 data spasial dengan jenis *feature* yang sama menjadi satu data baru, umumnya digunakan untuk mendapatkan informasi kelas unit ruang.
4. *Reclassify*, merupakan proses yang digunakan untuk melakukan klasifikasi ulang terhadap data yang telah dikelaskan sebelumnya berdasarkan atribut tertentu.
5. *Buffering*, merupakan proses analisis spasial yang digunakan untuk mendapatkan data baru berupa data polygon yang merepresentasikan jarak tertentu suatu *feature*.
6. *Network*, merupakan proses analisis spasial yang menggunakan data garis untuk menghubungkan suatu titik ke titik lainnya.

### 1.6. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Secara keseluruhan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan *Masterplan* Desa Mandiri Budaya Margodadi adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender/3 bulan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (*workplan*) yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini selengkapnya disajikan pada tabel 1.2. berikut:

**Tabel 1.2.**  
**Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

No	Uraian Kegiatan	Sep		Oktober				Nopember				Des		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1	Melakukan review terhadap KAK, menyusun tenaga ahli, penjadwalan, dan metodologi, menyusun instrument pendataan													
2	Paparan Laporan Pendahuluan													
3	Survey Lapangan													
4	Kajian Pustaka													
5	Rapat Konsultansi													
6	Penyusunan Profil (table, grafik, dan peta)													
7	Paparan Laporan Antara													
8	Analisis Pengembangan													
9	Penetapan Visi dan target													
10	Penyusunan Rencana Aktivitas Pengembangan													
11	Rapat Konsultansi													
12	Paparan Laporan Akhir													
13	Penyempurnaan Laporan Akhir													



## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL DESA MANDIRI BUDAYA

#### 2.1. Pendekatan Perencanaan

##### 2.1.1. Rasional Komprehensif

Menurut Hoogerwerf seperti yang dikutip dalam (Islamy, 1988:4.2) model analisis kebijakan rasional-komprehensif (sinoptis) adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap (komprehensif). Analisis dilakukan dengan teliti, cermat dan detail dengan memanfaatkan sejumlah besar data/informasi yang harus dikumpulkan hingga membuahkan hasil dalam bentuk keputusan/kebijakan yang memberi dampak positif.

Model ini merupakan model yang paling dikenal dan juga paling luas diterima di kalangan pengkaji kebijakan. Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis.

Model analisis ini sangat mengandalkan pembuatan keputusan secara rasional yang disebut Teori Rasional Komprehensif, yang secara ringkas oleh Anderson (1979:8) diuraikan sebagai berikut.

1. Pengambil keputusan dihadapkan kepada suatu masalah tertentu yang terpisah dari masalah-masalah lainnya, atau paling tidak, dapat diperbandingkan dengan masalah-masalah lainnya;
2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan target-target diperjelas, serta disusun secara berurutan sesuai dengan derajat pentingnya;
3. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah, diuji;
4. Seluruh konsekuensi (biaya dan manfaat) dari setiap pilihan alternatif, dicari;
5. Setiap alternatif beserta konsekuensinya, diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya; dan
6. Pengambil keputusan memilih alternatif yang dapat memaksimalkan pencarian tujuan, nilai, dan target.

Apabila dirunut, model ini merupakan model ideal dalam merumuskan kebijakan, dalam arti mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan. Studi-studi kebijakan biasanya memfokuskan pada tingkat efisiensi dan keefektifan kebijakan (Nugroho, 2006: 82). Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain;



2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau saran yang menjadi pedoman pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya;
3. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama;
4. Teliti juga akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih;
5. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lain yang ada; dan
6. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya, yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan (Abdul Wahab, 2005: 19).

### 2.1.2. Perencanaan Pembangunan

Berbagai definisi mengenai perencanaan telah dikemukakan oleh berbagai ahli perencanaan, dan ternyata kesemuanya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tetapi tidak memperlihatkan adanya konsensus. Beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan perencanaan, antara lain:

1. Dipandang dari sudut kegiatan dasar manusia yang terkandung dalam tingkah laku manusia pada semua tingkatan masyarakat, perencanaan adalah “suatu proses pemikiran dan tindakan manusia yang berorientasi masa depan.”
2. Ditinjau dari sudut pilihan rasional, maka perencanaan adalah “suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan di masa depan yang sesuai melalui suatu tahapan pemilihan.”
3. Ditinjau dari sudut pemecahan masalah (*problem solving*), perencanaan adalah “proses pemecahan masalah yang ditujukan pada jenis-jenis masalah yang sangat spesifik.”

Sementara, perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih, 2014:92). Terdapat pula definisi lain yang menyatakan perencanaan pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan yang mempunyai beberapa implikasi. *Pertama*: Memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. *Kedua*: mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. *Ketiga*: Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan (Coralie Bryant dan Louise G. White, 1982).

Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan; dan
2. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.





### 2.1.3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan umumnya didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutkan secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Kegagalan pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Asdak, 2012).

Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 (tiga) aspek penting yakni ekologi, ekonomi, dan sosial (Asdak, 2012). Lebih lanjut dijelaskan oleh Sumarwoto dalam Sugandhy dan Hakim (2007), bahwa pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu. Viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usaha.

Von Stoker menjelaskan adanya 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yakni perlunya koordinasi dan integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan Von Stoker mencakup 3 (tiga) aspek, antara lain:

*Pertama:* keberlanjutan sistem sosial. Menurut aspek ini bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi para pemangku kepentingan. Keberlanjutan sistem sosial menekankan pada peningkatan kualitas dari pada kuantitas. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberlanjutan sistem sosial ini.

*Kedua:* keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi dimaknai sebagai cara untuk “mempertahankan” atau menjaga kapital (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial) agar tidak mengalami kemerosotan.

*Ketiga:* keberlanjutan ekologis. Keberlanjutan ekologi sangat diperlukan oleh kehidupan manusia karena kehidupan manusia ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sebagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut seharusnya digunakan untuk menciptakan (inovasi) teknologi, sehingga dapat menciptakan bentuk kegiatan ekonomis. Dengan demikian, aktivitas sosial, ekonomi, dan didukung dengan kemampuan ekologi akan berkelanjutan mengiringi laju pembangunan.

### 2.1.4. Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja, “bangun” juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga bisa dikatakan pembangunan meliputi bentuk (anatomik), kehidupan (fisiologis), dan perilaku (behavioral). Sementara Bryant dan White (1982) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu:



1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*);
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*);
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*); dan
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Dalam kaitannya dengan desa, sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9. Pembangunan Desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten, serta antarkabupaten.

Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1), Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Terdapat pula pendapat yang menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, serta secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek dapat diartikan sebagai peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

## 2.2. Desa Budaya

Desa/kelurahan budaya merupakan desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.

Desa/Kelurahan Budaya di DI Yogyakarta sudah ada sejak 1995, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DI Yogyakarta nomor 325/KPTS/1995. Pada mulanya berjumlah 32 dengan lokasi desa-desa yang ada di Kabupaten, sedangkan Kota Yogyakarta belum ada



Desa Budaya. Sejak tahun 1995 sampai 2013, Desa Budaya telah mengalami perkembangan potensi dan pembangunan, begitu juga keinginan untuk menetapkan adanya Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta. Perubahan kondisi tentunya dipicu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta. Perkembangan munculnya UU Keistimewaan tersebut, membawa konsekuensi munculnya aturan baru tentang Desa Budaya. Dua tahun setelah UU Keistimewaan disahkan, muncul Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya.

Peraturan gubernur ini secara keseluruhan mencakup aspek pengembangan, penilaian desa budaya, dan klasifikasi desa budaya. Merujuk pada pasal 1 Pergub 36 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Budaya diartikan sebagai aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan hasil-hasilnya, diantaranya dalam wujud adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, dan warisan budaya. Sedangkan yang dimaksud desa/kelurahan budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi potensi budaya yang dimilikinya yang nampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, dan warisan budaya.

Di dalam Pergub nomor 36 tahun 2014 tentang desa/kelurahan budaya. Pada pasal 4, taraf perkembangan desa/kelurahan budaya adalah tumbuh, berkembang, dan maju. Untuk mengklasifikasi desa/kelurahan budaya ke dalam kategori di atas, maka diperlukan proses akreditasi terhadap desa/kelurahan budaya setiap 5 tahun sekali melalui tim akreditasi. Dengan melihat pasal 6 pergub nomor 36, tim akreditasi harus berjumlah ganjil dan terdiri dari unsur; ahli arsitektur, pemerhati budaya, seniman, dan unsur Dinas Kebudayaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Fungsi dan tugas tim akreditasi di atas tercantum pada pasal 7. Tim akreditasi berfungsi: memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa/Kelurahan budaya, menilai setiap usulan pembentukan Desa/Kelurahan budaya, melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa/Kelurahan budaya, membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa/Kelurahan budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Sedangkan tugas tim akreditasi meliputi; melakukan evaluasi penetapan Desa/Kelurahan budaya sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi akreditasi setiap lima tahun sekali, melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, dan kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi serta membina Desa/Kelurahan budaya, menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa/Kelurahan budaya secara berkala satu tahun sekali, membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa/Kelurahan Budaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, dan memberikan rekomendasi penunjang tenaga pendamping teknis Desa/Kelurahan budaya.

Selanjutnya, setelah dilakukannya penetapan Desa/Kelurahan budaya, Pemerintah Desa/Kelurahan harus menetapkan pengurus pengelola Desa/Kelurahan budaya yang terdiri dari pembina dan pengurus harian sebagaimana tercantum pada ayat 1 dan 2 pasal 8 Pergub No 36 tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya. Tugas dari pengelola/pengurus tersebut adalah melakukan pengolahan kekayaan dan keragaman budaya di Desa/Kelurahan budaya.



Tahun 2014, kajian tentang Desa Budaya lebih diarahkan kepada dua wujud yang lain, yakni wujud yang berupa aktivitas sosial (*social system*) dan wujud benda-benda budaya (*material system*) dengan mendeteksinya lewat tujuh unsur kebudayaan sebagaimana dipopulerkan Koentjaraningrat dengan sejumlah modifikasi, yaitu (1) sistem kepercayaan, (2) sistem kesenian, (3) sistem mata pencaharian, (4) sistem teknologi, (5) sistem komunikasi, (6) sistem sosial, dan (7) sistem lingkungan, tata ruang, dan arsitektural. Ketujuh unsur kebudayaan kemudian merumuskan beberapa unsur yang penting terkait Desa Budaya, yaitu (1) kuliner, (2) kerajinan, (3) arsitektur tradisional dan tata ruang, (4) warisan budaya dan cagar budaya, kesenian, (5) adat istiadat dan upacara adat, dan (6) sastra dan bahasa Jawa. Unsur-unsur diatas direduksi menjadi bahan penilaian untuk mengklasifikasikan Desa Budaya ke dalam tiga taraf, yakni Desa Budaya dengan taraf tumbuh, berkembang, atau maju. Unsur-unsur diatas dikedepankan yang direduksi dalam lima bentuk yang lebih kasat mata, yaitu:

1. Adat dan tradisi;
2. Kesenian dan permainan tradisional;
3. Bahasa, sastra dan aksara;
4. Kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional;
5. Penataan ruang, bangunan, dan warisan budaya.

### 2.3. Desa Wisata

Pengembangan pariwisata perdesaan merupakan dampak dari adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata. Tumbuhnya tren dan motivasi perjalanan wisata, minat khusus yang menginginkan wisata yang kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat lokal, serta tertarik untuk mempelajari budaya dan keunikan lokal sehingga mendorong pengembangan wisata perdesaan. Pariwisata perdesaan merupakan model pariwisata baru, sering juga dikenal dengan pariwisata minat khusus (*special interest tourism*). Objek wisata perdesaan merupakan suatu desa yang mempunyai sarana atau objek yang mendukung kegiatan kepariwisataan dan mempunyai potensi besar dalam sektor pariwisata, sehingga layak untuk dijadikan dan dikembangkan menjadi objek wisata baru.

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu Desa Wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011: 1).

Ada dua pengertian tentang desa wisata: (1) Apabila tamu menginap disebut Desa Wisata; (2) Apabila tamu hanya berkunjung disebut wisata desa. Masyarakat adalah penggerak utama dalam Desa Wisata. Masyarakat itu sendiri yang mengelola pariwisata tersebut sehingga tidak ada investor yang bisa masuk untuk mempengaruhi perkembangan Desa Wisata itu sendiri. Apabila ada suatu Desa Wisata yang dikelola oleh investor berarti desa tersebut bukanlah Desa Wisata dalam arti sebenarnya (Hasbullah Asyari, 2010: 2).

Masyarakat menjadikan rumah-rumah mereka atau sebagian kamar-kamar mereka menjadi tempat tinggal tamu sementara (*homestay*) dalam suatu Desa Wisata. Akan



menjadi komplis apabila tamu-tamu bisa menikmati keseharian rakyat (*live in*) merasakan sajian makan dan jenis atraksi kebudayaan desa. Desa Wisata akan sukses kalau seluruh anggota masyarakat baik kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, pemuda, dan anak-anak ikut mendukung keberadaan desa wisata tersebut (Hasbullah Asyari, 2010:3).

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah suatu daerah wisata yang menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian, adat istiadat, memiliki arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya komponen kepariwisataan (Soetarso Priasukmana, 2001: 37).

Desa Wisata dalam artian sederhana merupakan suatu objek wisata yang memiliki potensi seni dan budaya unggulan di suatu wilayah perdesaan yang berada di pemerintah daerah. Desa Wisata merupakan sebuah desa yang hidup mandiri dengan potensi yang dimilikinya dan dapat menjual berbagai atraksi-atraksinya sebagai daya tarik wisata tanpa melibatkan investor. Berdasarkan hal tersebut pengembangan Desa Wisata merupakan realisasi dari undang-undang otonomi daerah (UU No.22/99), maka dari itu setiap kabupaten perlu memprogramkan pengembangan Desa Wisata sesuai dengan pola PIR tersebut.

Desa Wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Inskeep (1991) dengan sangat baik mengungkapkan bahwa Desa Wisata merupakan bentuk pariwisata, dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Terkait dengan konsep pengembangan Desa Wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan Desa Wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan Desa Wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan Desa Wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Desa Wisata (dalam Soetarso Priasukmana, 2001: 38), antara lain 1) Mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternatif. 2) Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat. 3) Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk.

Syarat dan faktor pendukung pembangunan Desa Wisata yaitu: a) Memiliki potensi daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam, sosial, dan budaya), b) Memiliki dukungan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) lokal, c) Memiliki alokasi ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana berupa komunikasi dan akomodasi, serta aksesibilitas yang baik (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011:3).

#### ▪ **Faedah Konsep Desa Wisata**

Pengembangan konsep Desa Wisata dinilai sangat efektif dalam rangka mengenalkan serta memberi peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat perdesaan untuk memahami esensi dunia pariwisata serta menikmati hasil dari kepariwisataan tersebut. Bagi daerah yang memiliki karakteristik dan keunikan terutama di keseharian masyarakat desa maka pengembangan konsep ini sangat direkomendasikan. Ada tiga



keuntungan yang utama dalam pengaplikasian konsep ini pada suatu daerah yaitu; Pertama, dengan adanya Desa Wisata maka pengelola harus menggali dan mempertahankan nilai-nilai adat budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun di desa tersebut. Lestarinya nilai-nilai budaya merupakan daya tarik utama bagi wisatawan. Suatu desa tidak akan menarik jika tidak memiliki budaya, adat istiadat yang unik serta *way of living* yang eksotis.

Kedua, dengan konsep ini maka secara otomatis masyarakat desa yang notabene memiliki kemampuan ekonomi yang kurang dapat berperan aktif dalam kelangsungan Desa Wisata. Dengan kata lain, timbul lahan-lahan pekerjaan baru serta pemberdayaan masyarakat desa akan semakin lebih intensif. Akhir dari konsep ini tentu saja agar peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat akan lebih termaksimalkan. Ketiga, masyarakat desa dituntut untuk lebih bersahabat dengan alam sekitar. Lingkungan yang asri, pohon-pohon yang rindang serta terawat adalah salah satu komponen daya tarik Desa Wisata.

#### ▪ Tipologi Desa Wisata

Gambaran tipologi Desa Wisata tersebut, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal (adat tradisi kehidupan masyarakat, artefak budaya, dan sebagainya) sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah perdesaan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat perdesaan, baik terkait dengan aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktivitas lainnya.
2. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (pegunungan, agro/perkebunan dan pertanian, pesisir–pantai, dan sebagainya). Yaitu wilayah perdesaan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga desa tersebut memiliki potensi keindahan *view* dan *landscape* untuk menarik kunjungan wisatawan.
3. Desa Wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama. Yaitu wilayah perdesaan yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/lansekap).
4. Desa Wisata berbasis keunikan aktivitas ekonomi kreatif (industri kerajinan, dan sebagainya) sebagai daya tarik wisata utama. Yaitu wilayah perdesaan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktivitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas.

#### 2.4. Desa Prima

Kemunculan desa prima merupakan respon dari kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup tinggi yang ditunjukkan dengan angka Rasio Gini sebesar 0,432. Kesenjangan di perkotaan lebih tinggi (0,435) dibanding kesenjangan yang terjadi di perdesaan (0,340). Sementara indeks kedalaman



kemiskinan di perdesaan (2,29) juga menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan (2,15), yang berarti warga miskin perdesaan harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dengan membayar pengeluaran konsumsi yang lebih besar daripada warga miskin perkotaan. Data dari BPS juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2017 adalah sekitar 488 ribu jiwa atau sekitar 13,02 persen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional sebesar 10,96 persen (BPS DIY, 2017). Berlatar dari adanya kesenjangan antara warga kaya dan warga yang miskin maka Desa Prima hadir. Kondisi kesenjangan kemiskinan selalu erat kaitannya dengan kelompok-kelompok marjinal. Salah satu kelompok yang termasuk kelompok marjinal adalah kelompok perempuan. Desa Prima kemudian secara khusus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan dengan membuat kelompok usaha bagi perempuan. Secara konseptual maka yang disebut Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) merupakan sebuah desa percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi SDA atau SDM serta dengan mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, organisasi perempuan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama membangun kepedulian untuk menghapuskan kemiskinan.

Ruang lingkup Desa Prima mencakup beberapa hal. Pertama, pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan pada Desa Prima, khususnya bagi kelompok perempuan miskin menjadi prioritas. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha merupakan suatu upaya yang saling berkaitan, mulai dari peningkatan SDM (tingkat pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya dan lingkungan) hingga kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan dalam penentuan usahanya. Kedua, partisipasi perempuan meliputi keikutsertaan perempuan mulai dari perencanaan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan hingga pengambilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan. Ketiga, akses informasi bagi kelompok perempuan. Harapan dari adanya Desa Prima ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan secara terpadu dan bersinergi melalui pengurangan beban biaya pada keluarga miskin di bidang kesehatan dan pendidikan.

Untuk itu, ada empat hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktivitas perempuan. Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengarusutamakan/memfokuskan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat. Kedua, menumbuhkan kesadaran sektor maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. Ketiga, mendorong tumbuhnya forum komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumberdaya dan informasi program-program pemberdayaan ekonomi baik dari pemerintah, swasta atau pun organisasi non-pemerintah. Keempat, mengembangkan model desa mandiri untuk mengurangi beban keluarga miskin.

Selain itu Desa Prima juga memiliki tujuan khusus yaitu; pertama, menstimulasi pengembangan usaha perempuan melalui keterampilan perempuan serta menggugah partisipasi berbagai pihak berkepentingan dalam pengembangan usaha perempuan dan



penanggulangan kemiskinan. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat, kaum perempuan khususnya dan dunia usaha dalam pengembangan perlindungan sosial melalui usaha dan sumber pembiayaan. Ketiga, meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin di berbagai kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Keempat, meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi, teknologi tepat guna dan berbagai sumber pembiayaan. Kelima, mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.

Model “Desa Prima” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) atau “Desa Mandiri” atau apapun namanya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, yaitu suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi baik kepada masyarakat yang kurang beruntung. Upaya ini terutama dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga miskin dalam biaya kesehatan dan pendidikan karena sampai saat ini kedua hal tersebut paling dirasakan sangat membebani kehidupan masyarakat miskin. Pengembangan model Desa Prima berlandaskan pada prinsip masyarakat membangun, artinya dalam pelaksanaannya pengembangan model Desa Prima akan bertumpu pada kekuatan masyarakat itu sendiri, dan dilaksanakan melalui proses yang sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri, untuk mencapai tujuan dengan kesepakatan masyarakat bersama. Dengan menyadari keragaman sosial budaya masyarakat, maka pengembangan Desa Prima sepenuhnya diserahkan pada komitmen masyarakat sendiri.

## 2.5. Desa Preneur

Sejak bangsa ini merdeka, orientasi pembangunan ekonomi terpusat di wilayah perkotaan. Akibatnya, kantong-kantong kemiskinan menumpuk di perdesaan. Puluhan ribu desa di pelosok Nusantara sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang. Hanya, warga desa lebih senang mencari jalan pintas dengan berurbanisasi ke perkotaan untuk mencari kerja. Urbanisasi tentu hanya memindahkan persoalan kemiskinan dari desa ke kota. Padahal, jika mau, sumber daya ekonomi desa sebenarnya dapat dioptimalkan oleh masyarakatnya. Karakter masyarakat perdesaan yang tahan kemalangan misalnya merupakan modal bagi lahirnya wirausaha desa. Kita tahu syarat kepribadian seorang *entrepreneur* sukses adalah mau bekerja keras dan tahan banting.

Geliat perekonomian perdesaan seringkali dinilai lambat dibanding pembangunan ekonomi perkotaan. Penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, diperlukan dua pendekatan yaitu: (a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan; dan (b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rustiadi dalam Bachrein, 2010). Potensi sumber daya desa selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika pun ada yang memanfaatkan, cenderung eksploitatif dan tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya desa.

Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha



Kerjasama



Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk  
Daerah Istimewa Yogyakarta



PT. AGHNA PARTNERSHIP KONSULTAN

☎ 0274 - 4438000  
✉ [aghnapartnership@gmail.com](mailto:aghnapartnership@gmail.com)  
📍 Peleman KG I/541 RT.049 RW.010,  
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta